

MENEGUHKAN PANCASILA SEBAGAI FILSAFAT PENDIDIKAN NASIONAL

Oleh
Agus Sutono*

ABSTRAK

Pertanyaan mendasar dalam penelitian ini adalah, apakah implementasi sistem pendidikan nasional bangsa ini sudah mencerminkan pandangan-pandangan filosofis yang berakar pada Pancasila? Metode dalam penulisan adalah dengan metode deskriptif-analitis serta menggunakan metode hermeneutik, kemudian dilakukan pencarian data-data yang paling relevan dan utama terkait dengan kajian tentang Pancasila dan pendidikan serta selanjutnya dilakukan analisis yang lebih tajam sehingga menghasilkan gagasan atau ide yang kreatif. Hasil penelitian ini antara lain adalah bahwa filsafat pendidikan Pancasila sebagai ruh dari sistem pendidikan nasional di Indonesia harus benar-benar dihayati sebagai sumber nilai dan rujukan dalam perencanaan strategis dibidang pendidikan di Indonesia. Filsafat Pendidikan Pancasila harus diimplementasikan secara nyata dan konsisten agar pembangunan manusia Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam cita-cita besar bangsa Indonesia dapat tercapai dengan prinsip-prinsip dasar dari nilai Pancasila yaitu prinsip religiusitas, perwujudan dan penghargaan atas nilai kemanusiaan, berpegang teguh pada jiwa persatuan sebagai bangsa, semangat menghargai perbedaan dan penghormatan pada kehidupan yang demokratis serta perwujudan nilai-nilai keadilan, yang semuanya harus terwujud melalui proses pendidikan yang bermartabat.

Kata kunci : Pancasila, filsafat, pendidikan

A. PENDAHULUAN

Landasan filosofis pendidikan nasional adalah Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Landasan filosofis pendidikan nasional berasumsi sebagai berikut:

1. Segala sesuatu berasal dari Tuhan sebagai pencipta. Hakikat hidup bangsa Indonesia adalah berkat rahmat Allah Yang

Mahakuasa dan perjuangan yang didorong oleh keinginan luhur untuk mencapai dan mengisi kemerdekaan. Selanjutnya, keinginan luhur, yaitu (a). negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur; (b). melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh bangsa tumpah darah Indonesia; (c). memajukan kesejahteraan umum,

Meneguhkan Pancasila Sebagai Filsafat Pendidikan Nasional

- mencerdaskan kehidupan bangsa; (d). ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
2. Pancasila merupakan mazhab filsafat tersendiri yang dijadikan landasan pendidikan, bagi bangsa Indonesia yang dituangkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dalam pasal 2, yang menyebutkan bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
 3. Manusia adalah ciptaan Tuhan, bersifat mono-dualisme dan monopluralisme. Manusia yang dicita-citakan adalah manusia seutuhnya, yaitu manusia yang mencapai keselarasan dan keserasian dalam kehidupan spiritual dan keduniawian, individu dan sosial, fisik dan kejiwaan.
 4. Pengetahuan diperoleh melalui pengalaman, pemikiran, dan penghayatan.
 5. Perbuatan manusia diatur oleh nilai-nilai yang bersumber dari Tuhan, kepentingan umum dan hati nurani.
 6. Pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani

dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

7. Kurikulum berisi pendidikan umum, pendidikan akademik, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, dan pendidikan profesional.
8. Mengutamakan Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) dan penghayatan. Berbagai metode dapat dipilih dan dipergunakan dalam rangka mencapai tujuan.
9. Peranan pendidik dan anak didik pada dasarnya berpegang pada prinsip keteladanan *ing ngarso sung tulado, ing madya mangun karso*, dan *tut wuri handayani*.

Dengan mendasarkan pada hal di atas maka terdapat sejumlah pertanyaan mendasar, apakah implementasi sistem pendidikan nasional bangsa ini sudah mencerminkan pandangan-pandangan filosofis yang berakar pada Pancasila?

B. METODE PENELITIAN

Metode dalam penulisan adalah dengan metode deskriptif-analitis serta menggunakan metode hermeneutik, kemudian dilakukan pencarian data-data yang paling relevan dan utama terkait dengan kajian tentang Pancasila dan pendidikan serta selanjutnya dilakukan analisis yang lebih tajam sehingga menghasilkan gagasan atau ide yang kreatif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sistem Pendidikan Nasional

Sistem pendidikan yang dialami sekarang ini merupakan hasil perkembangan pendidikan yang tumbuh dalam sejarah pengamaan bangsa di masa lalu. Pendidikan tidak berdiri sendiri, tetapi selalu dipengaruhi oleh kekuatan-keuaan politik, sosial, ekonomi, dan budaya (Jalaludin, 2007:168).

Pendidikan memiliki peran yang sangat strategi dalam menunjang kemajuan sebuah bangsa. Pasal 2 UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pasal 3 UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga menyebutkan bahwa Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Apa yang tertuang dalam kedua pasal tersebut di atas secara jelas menyatakan bahwa pendidikan sangat bernilai strategis untuk diwujudkan dalam rangka kemajuan peradaban bangsa Indonesia ini. Aspek-aspek yang hendak diwujudkan melalui sistem pendidikan nasional secara

komprehensif adalah dalam rangka membentuk manusia Indonesia yang diidealkan, yakni memenuhi semua tuntutan kodrat kemanusiaan manusia.

Pendidikan, selain sebagai sarana transfer ilmu pengetahuan, sosial budaya, juga merupakan sarana untuk mewariskan ideologi bangsa kepada generasi selanjutnya yang sekali lagi hanya dapat dilakukan melalui pendidikan. Suatu bangsa akan menjadi kuat dengan sistem pendidikannya yang kuat dan baik kualitasnya.

Pendidikan suatu bangsa akan secara otomatis mengikuti ideologi bangsanya. Oleh karenanya sistem pendidikan nasional Indonesia dijiwai, didasari, dan mencerminkan identitas Pancasila. Sementara cita dan karsa bangsa Indonesia, tujuan nasional dan hasrat luhur rakyat Indonesia, tersimpul dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai perwujudan jiwa dan nilai Pancasila. Cita dan karsa ini dilembangkan dalam sistem pendidikan nasional yang berumpu dan dijiwai oleh suatu keyakinan, dan pandangan hidup Pancasila. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa filsafat pendidikan Pancasila merupakan tuntutan nasional, sedangkan filsafat pendidikan pancasila adalah subsistem dari sistem negara Pancasila. Dengan kata lain, sistem negara Pancasila wajar tercermin dan dilaksanakan di dalam berbagai subsistem kehidupan bangsa dan masyarakat (Jalaludin, 2007:170)

Dengan melihat dan memerhatikan fungsi pendidikan dalam membangun potensi negara dan bangsa, khususnya dalam menumbuhkembangkan kebudayaan dan

kepribadian bangsa yang pada akhirnya menentukan eksistensi dan martabat bangsa, maka sistem pendidikan nasional dan filsafat pendidikan Pancasila seharusnya terbina dengan konsisten. Filsafat pendidikan Pancasila merupakan aspek ruhaniah atau spiritual sistem pendidikan nasional (Jalaludin, 2007:170).

Oleh karenanya menjadi sangat logis bahwa sistem pendidikan nasional yang dibangun dan hendak ditumbuhkembangkan dengan baik harus dijiwai oleh sistem filsafat pendidikan Pancasila. Filsafat pendidikan Pancasila sebagai fondasi yang akan membantu mewujudkan manusia yang diidealkan oleh Pancasila yang dapat berkembang sempurna semua aspek kediriannya.

2. Pancasila Sebagai Filsafat Pendidikan

Pancasila adalah dasar negara bangsa Indonesia yang memiliki fungsi dalam hidupan dan kehidupan bangsa dan negara Indonesia tidak saja sebagai dasar negara RI, tetapi juga alat untuk mempersatukan bangsa, kepribadian bangsa, pandangan hidupa bangsa, sumber dari segala sumber hukum positif dan sumber ilmu pengetahuan di Indonesia (Aziz, 1984:70)

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa terkandung dalam konsep dasar mengenai kehidupan yang dicitta-citakan, terkandung dasar pikiran terdalam dan gagasan mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik. Oleh karena Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa merupakan suatu kristalisasi dari nilai-nilai yang hidup

dalam masyarakat Indonesia maka pandangan hdupa tersebut dijunjung tinggi karena pandangan hidupa Pancasila berakar pada budaya dan pandangan hidup masyarakat. Dengan demikian pandangan hidup Pancasila bagi bangsa Indonesia yang bhineka tunggal ika tersebut harus merupakan asas pemersatu bangsa sehingga tidak boleh mematikan kenekaragaman (Kaelan,2013:43).

Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara Indonesia didasarkan atas prinsip konstitusionisme. Sebuah konsensus yang menjamin tegaknya konstitusionalisme negara modern pada proses reformasi untuk mewujudkan demokrasi, pada umumnya bersandar pada tiga elemen kesepakatan, yaitu : 1), kesepakatan tentang tujuan dan cita-cita bersama (the general goal of society or general acceptance of the same philosophy of goerment), 2). Kesepakatan tentang the rule of law sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan pemerintahan negara (the basis of government), 3). Kesepakatan tentang bentuk insitusi-institusi dan prosedur ketatanegaraan (the form of institutions and procedures). (Andrews, 1968:12). Dan sebagai sebuah bangsa, Indonesia mendasarkan pada konsep konstitusionalisme sebagaimana dinyatakan di atas.

Dalam sudut pandang Pancasila sebagai jati diri bangsa yang akan mencerminkan visi dan landasan filsafat pendidikannya, dapat terlebih dahulu dinyatakan bahwa proses terjadinya Pancasila tidak seperti ideolegi-ideologi lainnya yang hanya merupakan hasil pemikiran seseorang

saja namun melalui suatu proses kausalitas yaitu sebelum disyahkan menjadi dasar negara nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia.

Dari pandangan hidup ini maka dapat diketahui cita-cita yang ingin dicapai bangsa, gasan-gagasan kejiwaan apakah yang hendak diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ketika para pendiri negara Indonesia menyiapkan negara Indonesia yang merdeka, mereka sadar sepenuhnya untuk menjawab suatu pertanyaan dasar, “di atas dasar apakah negara Indonesia merdeka didirikan?”. Dengan jawaban yang mengandung makna hidup bagi bangsa Indonesia sendiri yang merupakan perwujudan dan pengejawantahan nilai-nilai yang dimiliki diyakini dan dihayati kebenarannya oleh masyarakat sepanjang masa dalam sejarah perkembangan dan pertumbuhan bangsa sejak lahir (Kaelan, 203:57).

Filsafat adalah proses berfikir secara mendalam dan sungguh-sungguh untuk mencari kebenaran sesuatu. Sementara filsafat pendidikan adalah pemikiran yang mendalam tentang kependidikan berdasarkan filsafat. Filsafat pendidikan juga dapat dimaknai sebagai kaidah filosofis dalam bidang pendidikan yang menggambarkan aspek-aspek pelaksanaan filsafat umum dan menitikberatkan pada pelaksanaan prinsip-prinsip dan keercayaan yang menjadi dasar dari filsafat umum dalam upaya memecahkan persoalan-persoalan pendidikan secara praktis (Jalaludin, 2007:19).

John Dewey, seorang filsuf yang banyak membahas mengenai pendidikan menyatakan bahwa filsafat pendidikan merupakan suatu pembentukan kemampuan dasar yang fundamental, baik yang menyangkut daya pikir atau intelektual maupun daya perasaan atau emosional, menuju tabiat manusia (Arifin, 1993:2).

Filsafat pendidikan juga dapat dimaknai sebagai ilmu yang pada hakikatnya merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dalam bidang pendidikan. Filsafat pendidikan merupakan aplikasi sesuatu analisis filosofis terhadap bidang pendidikan (Barnadib, 1991:3).

Untuk sampai kepada pemahaman yang lebih utuh mengenai filsafat pendidikan, memang harus dipahami dulu secara mendasar tentang pendidikan itu sendiri. Pendidikan diartikan sebagai suatu proses usaha dari manusia dewasa yang telah sadar akan kemanusiaannya dalam memimbing, melatih, mengajar dan menanamkan nilai-nilai dan dasar-dasar pandangan hidup kepada generasi muda, agar nantinya menjadi manusia yang sadar dan bertanggungjawab akan tugas-tugas hidupnya sebagai manusia, sesuai dengan sifat hakiki dan ciri-ciri kemanusiaannya, sehingga dapat ditegaskan bahwa proses pendidikan merupakan rangkaian usaha memimbing, mengarahkan potensi hidup manusia yang berupa kemampuan dasar dan kehidupan pribadinya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial serta dalam hubungannya dengan alam sekitarnya agar menjadi pribadi yang

bertanggung jawab (Jalaludin, 2007:22).

Atas dasar itu pula maka dapat dipahami secara komprehensif bahwa filsafat pendidikan merupakan kerja filosofis yang mengajukan sejumlah pertanyaan dasar dan menyelidiki aspek-aspek ralitas dan pengalaman yang banyak didapatkan dalam bidang pendidikan, untuk memastikan pendidikan dapat menyerap, mengolah, mengalisis, dan menjabarkan aspirasi dan idealitas masyarakat itu dalam proses pendidikan. Untuk itu pula pendidikan diharapkan bisa menggali dan memahami melalui peikiran filosofis secara menyeluruh secara radikal dan sangat mendasar.

Dalam kaitan Pancasila sebagai filsafat pendidikan maka harus dipahami bahwa Pancasila sebagai pandangan hidup yang diyakini dan menjiwai kehidupan masyarakatnya. Untuk mengidealisasikan dalam proses berbangsa maka harus ada upaya yang sungguh-sungguh mengenai bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat dilaksanakan melalui proses pendidikan. Pancasila meenjadi sumber nilai untuk mengarahkan proses pendidikan yang menyangkut secara jelas out put pendidikannya agar mampu menghasilkan manusia Indonesia yang diidealkan sebagaimana yang dikehendaki, yakni manusiayang mampu mengenali seluruh potensi kediriannya sehingga mampu menjalankan kehidupannya dengan penuh tanggung jawab dalam semua aspek atau dimensi kehidupannya.

3. Aspek Ontologis Filsafat Pendidikan Pancasila

Ontologi adalah cabang filsafat yang persoalan pokoknya adalah mempertanyakan mengenai kenyataan atau realitas. Persoalan-persoalan ni identik dengan pembicaraan mengenai hakikat “ada”. Hakikat “ada” dapat berarti tidak apa-apa, karena merujuk dan menunjuk pada hal umum (abstrak umum universal). Pengertian ini bar menjadi kongkret sejauh diberikan sesuatu dibelakangnya (Sutrisno, 1984:82).

Demikian halnya dengan Pancasila sebagai filsafat, ia memiliki isi yang abstrak umum dan universal. Pengertian abstrak umum dan universal dalam hal ini adalah pengertian pokok yang terdapat dalam setiap unsur-unsur sila dari Pancasila. Pancasila terdiri dari sila-sila yang mempunyai awalan dan juga kahiran, yang dalam tata bahasa membuat abstrak; dari kata dasarnya yang artinya meliputi hal yang jumlahnya tidak terbatas dan tidak berubah, terlepas dari keadaan, tempat, dan waktu. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang menjiwai sistem pendidikan nasional tidak bisa dipisahkan denga kenyataan yang ada, karena pendidikan nasional itu dasarnya adalah Pancasila dan UUD 1945, sehingga hal ini menjadi bentuk kesatuan yang utuh.

Hal inilah yang kemudian secara konsisten harus masuk didalam tujuan dari sistem pendidikan nasional yang disebutkan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

a. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa

Sila pertama Pancasila ini menjiwai sila-sila yang lainnya. Di dalam sistem pendidikan nasional dijelaskan bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Dengan sila pertama ini, maka hasil proses pendidikan diharapkan dapat menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang juga merupakan bagiandari sistem pendidikan nasional. Hal ini karena sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yaitu untuk menjadikan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Oleh karenanya dalam lingkungan yang memungkinkan proses pendidikan berlangsung, yaitu di keluarga, sekolah dan di masyarakat ditanamkan nilai-nilai keagamaan dan Pancasila.

Dalam aspek praksis maka dikembangkan sejumlah mata pelajaran yang menunjang pencapaian tujuan pada bagian ini yaitu melalui pelajaran Agama serta Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Mata pelajaran ini harus mampu tercerminkan dari sikap anak didik yang harus memiliki kepercayaan kepada Tuhan, menghormati antar pemeluk agama, yang semuanya harus tercermin dalam kehidupan sehari-hari.

b. Sila kedua, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Manusia yang ada di bumi ini memiliki harkat dan martabat yang sama yang diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan fitrahnya sebagai hamba Allah (Darmoharjo, 1988:40). Oleh karenanya pendidikan tidak membedakan usia, agama dan tingkat sosial budaya dalam menuntut ilmu. Setiap manusia memiliki kebebasan dalam menuntut ilmu, mendapat perlakuan yang sama, kecuali tingkat ketakwaan seseorang. Dan oleh karena yang dibangun adalah masyarakat Pancasila, maka pendidikan harus dijiwai Pancasila sehingga akan melahirkan masyarakat yang susila, bertanggung jawab, adil dan makmur baik spiritual maupun material, dan berjiwa Pancasila (Jalaludin, 2007:174). Untuk itu

- sekolah harus mencerminkan sila-sila dari Pancasila
- c. Sila ketiga, Persatuan Indonesia
 Persatuan merupakan nilai dasar yang penting dalam menunjang eksistensi bangsa Indonesia. Persatuan kebangsaan ini akan mampu mengikis semangat kedaerahn ataupun kelompok. Pancasila dan UUD 1945 serta semangat nasionalisme terhadap bangsa Indonesia akan dapat menghapus perasaan primordialisme yan sempit dan merugikan bangsa. Sila ketiga Pancasila ini tidak membatasi golongan tertentu untuk memperoleh pendidikan. Semua golongan harus dapat menerima pendidikan yang baik , hingga setingg-tingginya sampai dengan batasan kemampuan berfikir yang dimilikinya sebagaimana terjamin dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 1.
- d. Sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan /Perwakilan
 Sila keempat mencerminkan semangat demokrasi yang selalu hadir dan mewarnai kehidupan masyarakat di Indonesia. Banyak sekali praktek-praktek hidup masyarakat yang menjadikan musyawarah sebagai intisari demokrasi yang dapat ditemukan hingga saat ini, karena iniah ciri hidup masyarakat Indonesia. Dalam aspek pendidikan , demokrasi sangat relevan untuk terus dikembangkan dan mencerminkan prinsip –prinsip dalam pendidikan yang mengajarkan tentang penghargaan atas pendapat dan pikiran orang lain. Selain itu sangat sejalan dengan UUD 145 pasal 28 yang secara jelas berkaitan dengan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Oleh karenanya dalam menyusun tujuan pendidikan, diperlukan ide-ide dari banyak orang demi kemajuan pendidikan di Indonesia.
- e. Sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
 Tujuan negara salah satunya adalah untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana termaktub dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Keadilan yang hendak diwujudkan meliputi keadilan dalam bidang materila dan spiritual. Dalam sistem pendidikan nasional maka maksud adil dalam arti yang luas mencakup seluruh aspek pendidikan yang ada. Adil dalam hal ini adalah adil dalam melaksanakan pendidikan. Adil dalam pendidikan yang berorientasi pada pembentukan ketakwaan kepada Tuhan maupun pendidikan yang berorientasi pada keunggulan lahiriahnya yang terwakili dalam

kemampuan penguasaan ilmu dan teknologi.

Adil juga dimaknai sebagai sikap ataupun kebijakan yang memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan secara layak, serta tidak ada diskriminasi-diskriminasi apapun dalam bidang pendidikan yang telah menjadi hak warga negara ini.

4. Aspek Epistemologis Filsafat Pendidikan Pancasila

Epistemologi merupakan studi filsafat yang berfokus pada sumber, syarat, dan proses terjadinya ilmu pengetahuan, batas validitas, serta hakikat ilmu pengetahuan. Melalui filsafat kita dapat menentukan tujuan-tujuan yang akan dicapai demi peningkatan ketenangan dan kesejahteraan hidup, pergaulan dan berwarga negara.

Dasar epistemologis Pancasila tidak dapat dipisahkan dengan dasar ontologisnya. Pancasila sebagai suatu ideologi bersumber pada nilai-nilai dasarnya yaitu filsafat Pancasila (Poespowardoyo, 1991:50). Sumber pengetahuan Pancasila adalah nilai-nilai yang ada pada bangsa Indonesia yang ditemukan dalam adat istiadat serta kebudayaan dan nilai religius (Kaelan, 2013:148).

- a. Sila pertama, Ketuhanan yang Maha Esa
Pemikiran tentang apa dan bagaimana sumber pengetahuan manusia diperoleh melalui akal atau panca indera dan dar ide

atau Tuhan. Berbeda dengan Pancasila, ia lahir tidak secara tiba-tiba, tetapi melalui proses pangang yang dimatangkan dengan perjuangan. Pancasila digali dari bumi Indonesia yang merupakan dasar negara, pandangan hidup bangsa, kepribadian bangsa, tujuan atau arah untuk mencapai cita-cita dan perjanjian luhur rakyat Indonesia (Widjaya, 1985:176-177). Oleh karenanya Pancasila bersumber dari bangsa Indonesia yang prosesnya melalui perjuangan rakyat dengan bersumberkan pada nilai-nilai keutamaan hidup yang telah lama dijiwai dan hidup dalam diri masyarakat Indonesia.

- b. Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Pribadi manusia adalah subjek yang seara potensial dan aktif berkesadaran tahu atas eksistensi diri, dunia, bahkan juga sadar dan tahu bla di suatu ruang dan waktu “tidak ada” apa-apa (kecuali ruang dan waktu itu sendiri) (Jalaludin, 2007:177). Manusia memiliki potensi atau basis yang dapat dikembangkan. Pancasila adalah ilmu yang diperoleh melalui perjuangan yang sesuai dengan logika. Dengan memiliki ilmu moral, diharapkan tidak ada segala bentuk kekerasan dan kesewenang-wenangan manusia terhadap lainnya. Tingkat kedalaman pengetahuan merupakan perwujudan dari

potensi rasio dan intelegensi yang tinggi. Proses pembentukan pengetahuan melalui lembaga pendidikan secara teknis edukatif lebih sederhana. Tidak boleh ada monopoli kebenaran. Nilai pengetahuan dalam pribadi telah menjadi kualitas dan martabat kepribadian subjek pribadi yang bersangkutan, baik secara intrinsik, dan bahkan lebih-lebih secara praktis (Jalaludin, 2007:177).

- c. Sila ketiga, Perstuan Indonesia
Proses terbentuknya pengetahuan manusia merupakan hasil dari kerja sama atau produk hubungan dengan lingkungannya. Potensi dasar dengan aktor kondisi lingkungan yang memadai akan membentuk pengetahuan. Dalam hal ini, pendidikan secara jelas mencontohkan bagaimana interaksi sosial adalah bagian kodrati manusia. Hubungan atau interaksi inilah yang memerlukan pedoman yaitu salah satunya Pancasila.
- d. Sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam permusyawaratan/Perwakilan
Dalam sistem pendidikan nasional, pendidikan memiliki peran yang sangat besar tetapi harus diperlukan kesadaran yang lebih tinggi bahwa ada institusi-institusi diluar pendidikan formal yang juga berperan bagi keberhasilan

sebuah pendidikan, yaitu keluarga dan masyarakat.

Pelibatan keluarga dan masyarakat inilah yang dapat memperkuat tercapainya tujuan pendidikan nasional yang akan semakin mampu mendorong setiap manusia memiliki kebebasan dalam mengemukakan pendapat dengan melalui lembaga pendidikan atau saluran informal lainnya. Mampu mewujudkan ruang dialog sebagai cerminan nilai-nilai demokrasi secara luas namun bertanggung jawab

- e. Sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Semua proses pendidikan dan tujuan pendidikan harus diarahkan pada tercapainya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan menjadi rujukan penting untuk diwujudkan. Pendidikan yang dikembangkan dapat ber sumber dari pendidikan yang bersifat informal, formal maupun non formal.

5. Aspek Aksiologis Filsafat Pendidikan Pancasila

Aksiologi merupakan cabang filsafat yang memfokuskan perhatian pada persoalan nilai. Nilai tidak akan timbul dengan sendirinya, nilai timbul karena manusia memiliki bahasa yang digunakan dalam komunikasi sehari-hari. Sehingga masyarakat menjadi wadah timbulnya nilai. Dikatakan memiliki nilai apabila berguna, benar,

bermoral, etis dan bernilai religius (Jalaludin, 2007:179).

Nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila merupakan cita-cita, harapan, dambaan bangsa Indonesia yang akan diwujudkan dalam kehidupannya. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu memiliki tingkatan dan bobot yang berbeda, namun tidak saling bertentangan. Pancasila merupakan substansi utuh atau kesatuan organik (Kaelan, 2013:162-163).

Dengan demikian Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa memiliki nilai-nilai; ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyataan dan keadilan. Nilai ideal, material, spiritual, dan nilai positif dan juga nilai logis, estetika, etis, sosial dan religius (Jalaludin, 207:179).

a. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa

Kepercayaan kepada Tuhan merupakan hal utama dalam setiap ajaran agama yang mencerminkan sikap religiusitas manusia. Oleh karena itu pendidikan harus mampu mendorong manusia untuk semakin meningkatkan tingkat religiusitasnya dengan baik. Pendidikan dari semua tingkatan harus menjadi ladang persemaian yang baik dalam menumbuhkan ketakwaan kepada Tuhan. Olehkarenanya pula kurikulum pendidikan harus memastikan bidang-bidang yang berkaitan dengan keagamaan masuk didalamnya.

b. Sila ke dua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Kedamaian yang penuh kedamaian, kerukunan merupakan kunci keberhasilan dalam mewujudkan harkat dan martabat manusia yang sesungguhnya. Keberadaban hanya bisa dibangun ketika suasana persaudaraan tumbuh dalam lingkungan manusia. Pendidikan dalam hal ini harus mampu mendorong semangat kedamaian, kerukunan dan persaudaraan untuk dapat mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, sebab hal ini merupakan nilai luhur yang dicita-citakan

c. Sila ke tiga, Persatuan Indonesia

Kerukunan adalah dasar dari nilai persatuan sehingga pendidikan dalam semua level atau tingkatan harus bisa dan mampu menumbuhkembangkan jiwa kerukunan, sebab kerukunan adalah salah satu dari jiwa Pancasila. Kerukunan juga mengandaikan semangat rela berkorban untuk kepentingan yang lebih besar yaitu persatuan masyarakat. Pendidikan harus diarahkan untuk memantabkan perasaan akan pentingnya persatuan dalam menjadi kehidupan berbangsa dan bernegara.

d. Sila ke empat, Kerakyataan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Pendidikan harus mampu mewujudkan semangat

- demokrasi yang egaliter sebagai sebuah prinsip yang penting dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kesiapan orang lain untuk mendengarkan pendapat orang lain serta menghargainya merupakan cita-cita yang harus diwujudkan melalui pendidikan. Tanpa semangat dari nilai ini maka pendidikan akan kehilangan roh yang sesungguhnya. Sebab kebebasan dalam pendidikanlah yang akan mampu memberikan pembebasan bagi manusia untuk bisa memahami siapa dirinya dan harus dengan cara yang bagaimana ia menempatkan orang lain. Nilai dasar inilah yang menjadi roh dari Pancasila yang harus ada dalam sistem pendidikan nasional Indonesia
- e. Sila ke lima, Keadilan bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Adil berarti seimbang antara hak dan kewajiban. Dalam hal ini ini, dalam segi pendidikan, adil itu seimbang antara ilmu yang berkaitan dengan pembentukan ketakwaan manusia dengan ilmu yang berorientasi pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Mengembangkan perbuatan luhur, menghormati hak orang lain, suka memberi pertolongan, bersikap benar, mengharga hasil karya orang lain merupakan nilai-nilai yang harus terus dihidupkan.

Dengan demikian, filsafat Pendidikan Pancasila adalah tuntutan formal yang fungsional dari kedudukan dan fungsi dasar negara Pancasila sebagai sistem kenegaraan Republik Indonesia Kesadaran memiliki dan mewarisi sistem kenegaraan Pancasila adalah dasar pengamalan dan pelesariannya, sedangkan jaminan utamanya adalah subjek manusia Indonesia seutuhnya. Subjek manusia Indonesia tersebut terbina melalui sistem pendidikan nasional yang dijiwai oleh filsafat pendidikan Pancasila

D. KESIMPULAN

1. Filsafat pendidikan Pancasila sebagai ruh dari sistem pendidikan nasional di Indonesia harus benar-benar dihayati sebagai sumber nilai dan rujukan dalam perencanaan strategis dibidang pendidikan di Indonesia. Segenap perubahan yang dimungkinkan dalam sebuah sistem pendidikan nasional, sebagai sebuah keniscayaan dalam menghadapi semua perubahan jaman, harus mempertimbangkan Pancasila sebagai kerangka acuan, yang berarti perubahan yang dimungkinkan adalah perubahan yang tidak berkaitan dengan nilai dasarnya tetapi perubahan dalam aspek instrumentalnya, sebagaimana misalnya dalam kebijakan Kurikulum 2013 saat ini.
2. Filsafat Pendidikan Pancasila harus diimplementasikan secara

nyata dan konsisten agar pembangunan manusia Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam cita-cita besar bangsa Indonesia dapat tercapai dengan prinsip-prinsip dasar dari nilai Pancasila yaitu prinsip religiusitas, perwujudan dan penghargaan atas nilai kemanusiaan, berpegang teguh pada jiwa persatuan sebagai bangsa, semangat menghargai perbedaan dan penghormatan pada kehidupan yang demokratis serta perwujudan nilai-nilai keadilan, yang semuanya harus terwujudkan melalui proses pendidikan yang bermartabat sebagaimana diciptakan Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrews, W.G., 1968, *Constitution and Constitutionalism*, Van Nostrand Company, Nw Jersey.
- Arifin, H.M. 1987, *Filsafat Pendidikan Islam*, Bina Aksara, Jakarta
- Barnadib, 1991, *Filsafat Pendidikan, Sistem dan Metode*, IKIP Yogyakarta
- _____, 1996, *Beberapa Aspek Subtansial Ilmu Pendidikan*, Andi, Yogyakarta.
- Jalaludin dan Abdullah, 2007, *Filsafat Pendidikan Manusia, Filsafat dan Pendidikan*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta
- Kaelan, *Negara Kebangsaan Pancasila Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis dan Aktualisasinya*, 2013, Paradigma, Yogyakarta
- O,neil, William F., 2002, *Educational Ideologies: Contemporary Expression of Educational Philosophies*, alih bahasa Omi Intan Naomi, Ideologi-Ideologi Pendidikan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Poespowardojo, Soeryanto, 1991, "Pancasila Sebagai Ideologi ditinjau dari Segi Pandangan Hidup Bersama", dalam *Pantjasila sebagai Ideologi*", BP-7 Pusat Jakarta
- Sutrisno, S. 1984, *Pengantar Filsafat Pancasila: Tanya Jawab dan Penjelarasannya*, Yogyakarta.
- UUD 1945
- UU No No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- *) Agus Sutono, S.Fil., M.Phil
Dosen Program Studi PPKn FPIPSKR Universitas PGRI Semarang, saat ini masih menempuh studi doktoral S3 Ilmu Filsafat UGM